

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran akan hak dan kewajiban perlu ditingkatkan secara terus-menerus karena setiap kegiatan maupun setiap organisasi, tidak dapat disangkal bahwa peranan kesadaran hak dan kewajiban amat menentukan dalam pencapaian tujuan. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintah negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*); tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).¹ Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.² Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.³

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang

¹ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P sistem dan prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 3.

² Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2005, hlm 24.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 53.

mencakup semua dan berakhir pada proses pemeriksaan di Pengadilan. Bagaimanapun caruk-maruknya Pengadilan kita, namun tetaplah itu merupakan akar dari sebuah negara hukum, ia berfungsi sebagai penopang bagi tegaknya dan suburnya sebuah negara hukum. Bisa dibayangkan jika tanpa adanya Pengadilan bagaimana jadinya sebuah negara, ia akan hancur, luluh lantah banyak kejahatan yang tidak teradili.⁴

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang Pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Usaha-usaha ini dilakukan demi untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana.⁵

Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHP mencantumkan “ penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.⁶ Penyidikan pada Pasal 1 butir 2 KUHP tercantum “ penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

⁴Yesmil Anwar & Adang , *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm1.

⁵Ibid, hlm28.

⁶Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 6.

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁷ Penuntutan, dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuat surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.⁸ Dan yang terakhir adalah tahapan pemeriksaan sidang di pengadilan.

Dari semua tahapan-tahapan di atas dalam kenyataannya tidak semua tahapan tersebut dapat dilakukan secara mulus atau lancar, ada beberapa tahapan saja yang dilakukan mungkin berhenti pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau bahkan sudah sampai pengadilan tetapi tidak dapat diproses sampai selesai sesuai tahapan yang sudah tercantum. Adanya kasus mengenai tindak pidana yang tidak diproses sampai selesai di pengadilan atau yang hanya sampai polres saja mungkin juga karena memang ada prosedurnya atau mungkin juga sudah bisa diselesaikan sampai tahap tertentu tanpa harus sampai pemeriksaan di pengadilan. Namun tidak jarang sebagian atau bahkan sebagian besar semua tahapan tersebut dapat dilakukan, sehingga dapat menentukan seberapa hukuman yang diterima untuk pelaku tindak pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

Dalam melakukan tahapan-tahapan tersebut baik aparat penegak hukum maupun dari kejaksaan pasti mengalami kendala sehingga menimbulkan tindak pidana tersebut tidak dapat diproses sampai selesai. Tentunya semua tindak pidana yang tidak diproses tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan, dan akan menimbulkan akibat hukum

⁷Ibid, hlm 11.

⁸Ibid, hlm 15.

yang sangat berpengaruh baik bagi aparat penegak hukum sendiri maupun bagi masyarakat. Dengan begitu maka akan menimbulkan tekanan-tekanan dan kritikan terhadap lembaga peradilan, dapat saja dimaklumi karena masyarakat sangat menginginkan agar lembaga peradilan itu dapat memberikan keadilan kepada masyarakat (baik secara substansial, ataupun secara formal). Namun keinginan-keinginan masyarakat ini bertolak belakang dengan apa yang diberikan oleh Pengadilan. Putusan-Putusan pengadilan serta perilaku-perilaku personil penegak hukum demikian itu tidak hanya sekedar menimbulkan tekanan-tekanan dan kritikan tapi telah pula menimbulkan reaksi keras berupa tindakan kerusuhan, kekerasan dan berbagai pelecehan terhadap lembaga peradilan.⁹

Pendapat masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi karena tidak adanya kontrol terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah kebawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum karena prinsip di atas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.¹⁰

⁹Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm 3.

¹⁰Ibid, hal 219.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ANALISA TINDAK PIDANA YANG TIDAK DILAKUKAN PENUNTUTAN KE PENGADILAN (STUDI KASUS POLRES NGAWI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya dikaji dan diteliti lebih rinci dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan?
2. Apakah akibat hukum yang timbul jika tindak pidana tidak dapat diselesaikan sampai ke Pengadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian harus jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

- b. Mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan jika suatu tindak pidana tidak dapat diselesaikan sampai ke Pengadilan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan peneliti di bidang ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana pada khususnya,
- b. Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor dan sebab akibat mengenai tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan sampai ke Pengadilan.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi ataupun literatur berbagai pihak akademisi dan penegak hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis,
- b. Guna mengembangkan pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan dalam hal menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Sebelum dilakukannya penuntutan maka harus ada prapenuntutan terlebih dahulu. Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 138 ayat (1), (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110 ayat (2) KUHAP:

- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Pasal 138 ayat (1), (2) KUHAP:

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 112.

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

- (2) Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Terjadinya penyelesaian di luar persidangan diatur dalam Pasal 82 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

Hak menuntut hukum karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain dari pada denda, tidak berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga ongkos mereka, jika penilaian telah dilakukan, dengan izin amtenaar yang ditunjuk dalam Undang-Undang umum, dalam tempo yang ditetapkan.

Ayat (2):

Jika perbuatan itu terencana selamanya denda juga benda yang patut dirampas itu atau dibayar harganya, yang ditaksir oleh amtenaar yang tersebut dalam ayat pertama.

Ayat (3):

Dalam hal hukuman itu ditambah diubah berulang-ulang membuat kesalahan, boleh juga tambahan itu dikehendaki jika hak menuntut

hukuman sebab pelanggaran yang dilakukan dulu telah gugur memenuhi ayat pertama dan kedua dari pasal itu.

Ayat (4):

Peraturan dari pasal ini tidak berlaku bagi orang belum dewasa, yang umurnya sebelum melakukan perbuatan itu belum cukup enam belas tahun. penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum yang diatur dalam Pasal 82 KUHP mirip dengan ketentuan hukum perdata mengenai transaksi atau perjanjian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.¹²

Penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, baik dalam melakukan pengumpulan data, penelitian data dan melakukan analisa terhadap obyek penelitian. Adapun metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di

¹²Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 3

masyarakat dalam sistem kehidupan yang mempola atau penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti, dimana dalam hal ini penulis memberi gambaran secara detail dan sistematis mengenai tindak pidana yang tidak dilakukan penuntutan ke Pengadilan di Polres Ngawi.¹³

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data :

- a. Data Primer ialah bahan-bahan buku yang mengikat.¹⁴ Terdiri dari norma dasar yaitu Pancasila, peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan.
- b. Data Sekunder ialah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut :

¹³Roni Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 58

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, hal 13

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 65.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan observasi dan wawancara (*interview*) adalah penting dilakukan. Wawancara merupakan teknik pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak kepolisian Polres Ngawi.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutan data kepola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.¹⁶ Setelah data yang diperoleh dan diperlukan telah berkumpul semuanya, maka tindak selanjutnya adalah memberikan analisis terhadap data tersebut. Adapun metode analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan cara kerja dengan

¹⁶ Lexy J.Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 103.

menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Metode ini digunakan apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksek. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian didiskusikan dengan data yang diperoleh dari objek sehingga dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan Penelitian ini mempunyai sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab 1 adalah pendahuluan, dalam pendahuluan ini penulis akan menulis mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penulisan, metode penelitian, dan yang terakhir tentang sistematika skripsi.

Bab 2 adalah tinjauan pustaka, dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menulis mengenai tinjauan mengenai tindak pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi menjadi dua poin yaitu pengertian tindak pidana dan pengertian sistem peradilan pidana, penulis juga akan membahas mengenai tinjauan mengenai proses pemeriksaan perkara pidana, selanjutnya mengenai dasar hukum penuntutan suatu tindak

pidana, dan yang terakhir mengenai terjadinya penyelesaian pidana di luar persidangan.

Bab 3 adalah hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menuliskan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai faktor-faktor penyebab suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan dan akibat hukum yang timbul jika tindak pidana tidak dapat diselesaikan sampai ke Pengadilan.

Bab 4 adalah penutup, dalam penutup ini penulis akan menuliskan tentang kesimpulan dari semua pembahasan dan saran.